

KEBIJAKAN STRATEGIS PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Pemerintah telah meluncurkan beberapa kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dimulai dengan pemberlakuan paket stimulus ekonomi pada awal tahun. Selanjutnya, pemerintah memberlakukan kebijakan dan optimalisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha. Adapun yang terbaru, pemerintah memberikan sejumlah stimulus dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan strategis tersebut dihadapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional terutama pada kuartal I.

Paket stimulus ekonomi ditujukan untuk berbagai kalangan. Paket kebijakan ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah diberikan melalui program diskon listrik. Adapun kebijakan untuk masyarakat kelas menengah berupa pemberian insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor padat karya, PPN DTP pembelian properti dan otomotif (electric vehicle/EV), dan PPnBM DTP otomotif (EV dan hybrid).

Program diskon listrik selama 2 bulan untuk daya terpasang 450VA-2200VA merupakan salah satu langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi di kuartal I tahun 2025. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, khususnya kelompok masyarakat kecil dan menengah. Selanjutnya hal tersebut diharapkan berdampak pada daya beli masyarakat yang terjaga di tengah tekanan harga pangan dan kebutuhan pokok.

Kebijakan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor padat karya dengan gaji sampai dengan Rp10 juta per bulan memberikan keringanan beban pajak bagi pekerja, sehingga pendapatan disposable (take-home pay) meningkat. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan dalam memberi dukungan bagi sektor padat karya agar tetap mampu menyerap tenaga kerja

secara optimal, sehingga menjaga stabilitas ketenagakerjaan.

PPN DTP pembelian properti terdapat dua skema, yaitu diskon PPN sebesar 100% untuk periode Januari-Juni 2025 dan diskon PPN sebesar 50% untuk periode Juli-Desember 2025. PPN DTP tersebut berlaku untuk pembelian rumah dengan harga jual sampai dengan Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama. Dengan adanya insentif ini, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam membeli rumah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan sektor properti.

Selanjutnya dalam mendukung adopsi kendaraan listrik, mengurangi emisi karbon, dan mendukung industri otomotif yang berkelanjutan, pemerintah menerapkan berbagai insentif fiskal untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan mobil hybrid. Beberapa insentif yang diberikan meliputi (a) PPN DTP sebesar 10% untuk kendaraan listrik KBLBB Completely Knocked Down (CKD), (b) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM DTP) sebesar 15% untuk kendaraan listrik KBLBB impor Completely Built Up (CBU) dan CKD, serta (c) PPnBM DTP sebesar 3% untuk kendaraan hybrid. Dengan adanya insentif ini, harga kendaraan bermotor listrik menjadi lebih terjangkau, sehingga mendorong transisi masyarakat menuju penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Kebijakan dan optimalisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat dan dunia usaha berupa:

1. Kenaikan UMP ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong konsumsi domestik.
2. Penyaluran program bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) akan disalurkan pada Februari dan Maret 2025 untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
3. Program MBG diluncurkan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil,

guna mendukung kesehatan dan produktivitas.

4. Penyaluran KUR bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat & stabilitas ketenagakerjaan melalui penguatan sektor informal.
5. Realisasi panen padi yang optimal pada kuartal I tahun 2025 menunjukkan ketahanan pangan Indonesia yang kuat dan kesiapan dalam menghadapi potensi krisis pangan global.

Stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional ditujukan untuk memberikan kemudahan dan kelancaran serta mendorong daya beli dalam menghadapi Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, dengan jabaran detail sebagai berikut. Pertama, penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 13-14% selama dua minggu, yakni pada 24 Maret -7 April 2025. Diskon ini berlaku untuk kelas ekonomi di 500 rute dalam negeri, dengan sebagian PPN tiket pesawat senilai Rp286,1 miliar ditanggung pemerintah, diatur pada PMK nomor 18/2025. Kedua, pemerintah juga menurunkan tarif tol dan transportasi selama mudik Lebaran, dengan diskon 20% pada arus mudik (24-27 Maret) dan arus balik (8-9 April). Tambahan diskon hingga 30% diberikan kepada pemudik yang terdampak pengalihan arus di Tol Cisumdawu. Ketiga, pemerintah, melalui PP nomor 11 Tahun 2025, memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI/Polri, hakim, dan pensiunan. Keempat, pemerintah meneken pengaturan pembayaran THR kepada karyawan swasta, pegawai BUMN dan BUMD, melalui SE Menaker nomor M/2/HK.04.00/III/2025. Kelima, pemerintah menghimbau pemberian bonus hari raya dari perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar resmi, melalui SE Menaker nomor M/3/HK.04.00/III/2025.

Berbagai kebijakan di atas diharapkan akan menjadi mewujudkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana menjadi target pembangunan nasional tahun 2025.

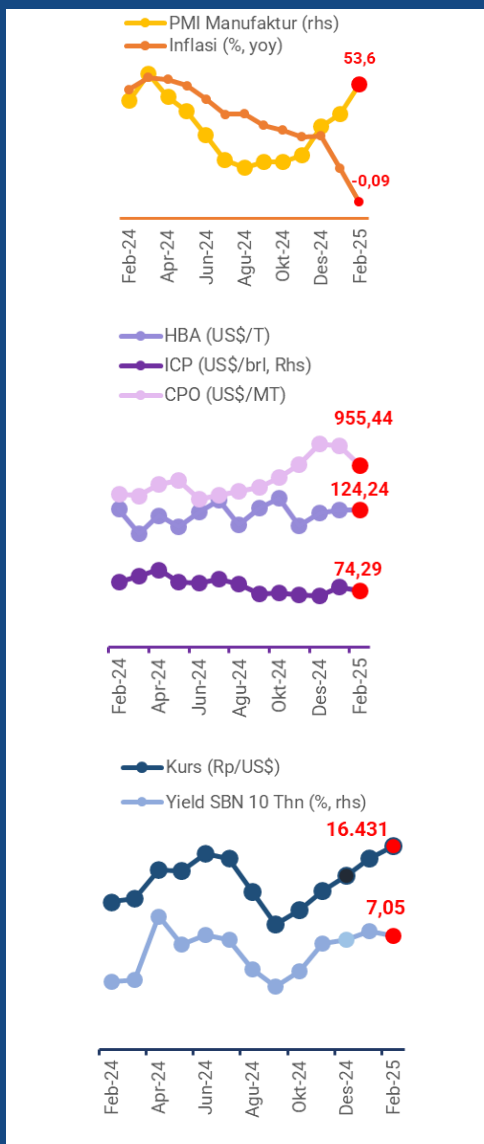
REALISASI APBN

s.d. 31 Februari 2025

Realisasi APBN 2025 s.d. 28 Februari 2025

Pendapatan Negara	Rp316,9 T (10,5% target)	Belanja Negara	Rp348,1 T (9,6% pagu)	Pembiayaan Anggaran	Rp220,1 T (35,7% target)
Penerimaan Pajak	Rp187,7 T (8,6% target)	Belanja K/L	Rp83,6 T (7,2% pagu)	Antara lain:	
Kepabeanaan dan Cukai	Rp52,6 T (17,5% target)	Belanja non-K/L	Rp127,9 T (8,3% pagu)	Pembiayaan Utang	Rp224,3 T (28,9% target)
PNBP	Rp76,4 T (14,9% target)	Transfer ke Daerah	Rp136,6 T (14,9% alokasi)	Pembiayaan Investasi	Rp(5,3) T (3,4% alokasi)
Defisit APBN	Rp31,2 T 0,13% PDB	Surplus Keseimbangan Primer	Rp48,1 T		

LEADING INDICATORS YANG BERPENGARUH TERHADAP POSTUR APBN



Sektor Riil

Pada Februari 2025, terjadi deflasi -0,09% (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan harga energi seperti diskon listrik yang insentif pemerintah. Di sisi lain, PMI Manufaktur meningkat ke 53,6, mencerminkan ekspansi yang lebih kuat. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan produksi dan pesanan baru, baik domestik maupun ekspor, seiring meningkatnya optimisme pelaku usaha.

Sektor Eksternal

Pada Februari 2025, Harga Batubara Acuan (HBA) naik tipis ke US\$124,24 per ton, didukung permintaan kuat dari China dan India untuk industri dan ketahanan energi. Sebaliknya, harga minyak sawit mentah (CPO) turun signifikan ke US\$955,44 per metrik ton tertekan oleh peningkatan pasokan global akibat panen melimpah di negara produsen utama dan melemahnya permintaan dari India serta Uni Eropa karena perubahan kebijakan impor. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) terkoreksi ke US\$74,29 per barel, dipengaruhi oleh prospek perlambatan ekonomi global yang menekan permintaan energi serta kebijakan produksi OPEC+ yang masih mempertahankan batas produksi di tengah volatilitas pasar minyak.

Sektor Keuangan

Sektor Keuangan domestik menghadapi tekanan pada Februari 2025 dengan nilai tukar Rupiah yang melemah hingga Rp16.431/US\$ dan *yield* SBN 10 tahun yang meningkat ke 7,05%. Kondisi ini dipengaruhi oleh capital outflow yang masih berlanjut akibat kebijakan The Fed yang mempertahankan suku bunga tinggi serta ketidakpastian ekonomi global. Tekanan terhadap Rupiah juga diperparah oleh fluktuasi harga komoditas dan sentimen pasar terhadap prospek ekonomi domestik. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75% guna menjaga stabilitas makroekonomi dan mengendalikan volatilitas pasar keuangan.

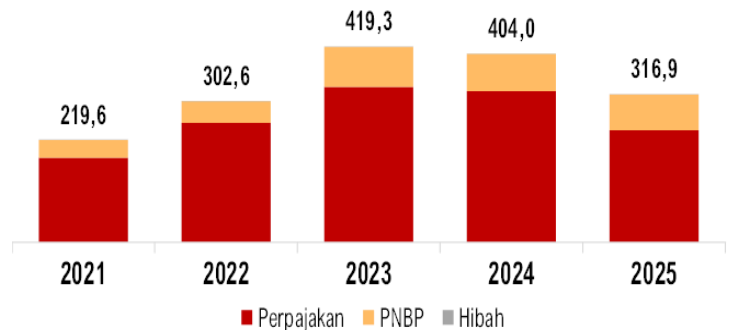
PENDAPATAN NEGARA

KINERJA PENDAPATAN NEGARA MENCAPI 10,5 PERSEN DARI TARGET APBN 2025

Realisasi pendapatan negara sampai dengan Februari 2025 mencapai Rp 316,9 T. Capaian tersebut mengalami perbaikan dibandingkan bulan Januari 2025. Kinerja penerimaan perpajakan mengalami perbaikan dibandingkan bulan Januari 2025. Dari sisi komponen, kinerja penerimaan pajak sampai dengan Februari 2025 mencapai Rp 187,8 T. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor administrasi diantaranya pergeseran pembayaran PPh 21 dampak implementasi tarif efektif rata-rata (TER), dinamisasi PPh Badan pada tahun sebelumnya, serta kenaikan restitusi terutama pada PPh Badan dan PPN dalam negeri.

Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai mampu mencapai Rp52,6 T. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga CPO, penurunan penerimaan bea masuk pada beras dan kendaraan bermotor, serta penurunan produksi hasil tembakau.

Pendapatan Negara (Rp T)



KINERJA PNBP S.D 28 FEBRUARI 2025 DIDUKUNG OLEH PENDAPATAN SDA, DAN PNBP K/L

Realisasi PNBP sampai dengan 28 Februari 2025 mencapai Rp76,4 T (14,9% dari APBN 2025). Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA) yang menyumbang 44,3% dari total realisasi PNBP s.d 28 Februari 2025. Sementara itu, capaian tertinggi diperoleh dari PNBP K/L yang mencapai 24,0% dari target APBN 2025.

Realisasi Pendapatan SDA Migas mencapai Rp17,5 T (15,5% dari APBN 2025). Realisasi tersebut dipengaruhi oleh penurunan ICP dampak meredanya ketegangan di Timur Tengah dan rencana Presiden Trump meningkatkan produksi minyak mentah AS pada level maksimum untuk menurunkan harga minyak mentah dunia. Selain itu, penurunan lifting gas bumi akibat penurunan tingkat alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua juga turut berpengaruh pada kinerja SDA Migas. Pada periode Januari 2025, rata-rata lifting minyak bumi sebesar 540,6 ribu barel/hari (2024: 532,1 ribu barel/hari) dan rata-rata lifting gas bumi mencapai sebesar 874,3 ribu barel/hari (2024: 930,0 ribu barel/hari). Sementara itu, rata-rata ICP periode Februari 2025 mencapai sebesar US\$75,6/barel (2024: US\$78,6/barel).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp16,3 T (16,8% dari APBN 2025). Realisasi tersebut utamanya didorong oleh pendapatan SDA pertambangan mineral sebesar Rp15,2 T (17,4% dari APBN 2025) terutama berasal dari penerimaan royalti batubara yang dipengaruhi oleh moderasi HBA serta penurunan produksi batubara. Realisasi pendapatan SDA kehutanan mencapai sebesar Rp0,9 T (16,5% dari APBN 2025) didukung oleh peningkatan pendapatan penggunaan kawasan hutan. Realisasi pendapatan SDA kelautan dan perikanan mencapai sebesar Rp0,1 T (8,2% dari APBN 2025) berasal dari Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan. Selanjutnya, realisasi pendapatan SDA panas bumi telah mencapai sebesar Rp0,1 T (2,3% dari APBN 2025) utamanya disumbang oleh peningkatan iuran tetap pada hampir seluruh WKP yang memiliki Izin Panas Bumi.

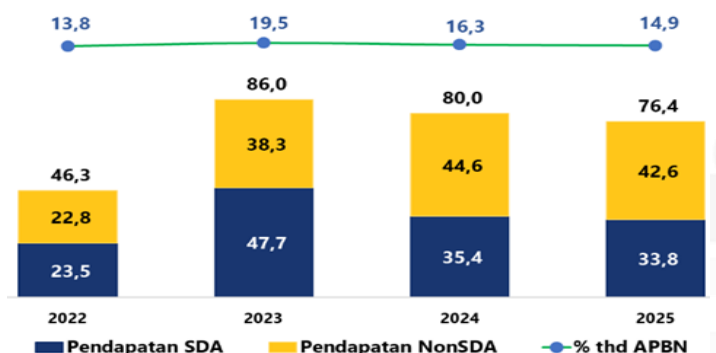
Realisasi Pendapatan KND mencapai sebesar Rp10,9 T (12,1% dari APBN 2025). Realisasi tersebut berasal dari pembayaran dividen Perbankan, yaitu dividen interim BRI tahun buku 2024. Pembayaran dividen interim BRI ini mengalami peningkatan sebesar 60,7% jika dibandingkan dengan pembayaran dividen interim BRI Tahun Buku 2023 yang sebesar Rp6,8 T.

Realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp23,3 T (18,3% dari APBN

2025). Realisasi tersebut utamanya disumbang oleh PNBP KL sebesar Rp18,4 T (21,3% dari APBN 2025) antara lain berasal dari pendapatan BUN dari pendapatan pengelolaan rekening negara dan pendapatan jasa transportasi. Kinerja PNBP lainnya ini juga disumbang oleh Pendapatan Penjualan Hasil Tambang yang terealisasi sebesar Rp4,9 T (13,3% dari APBN 2025) dipengaruhi oleh moderasi HBA. Sementara itu, Pendapatan Domestic Market Obligation (DMO) s.d 28 Februari 2025 belum mencatatkan penerimaan.

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai Rp8,4 T (10,8% dari APBN 2025). Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan BLU Sawit sebesar Rp1,3 T (10,0% dari APBN 2025), yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga referensi CPO, serta Pendapatan BLU Nonsawit sebesar Rp7,1 T (10,9% dari APBN 2025) dengan kontribusi terbesar berasal dari pendapatan jasa layanan rumah sakit dan pendapatan jasa layanan pendidikan.

Realisasi PNBP s.d 28 Februari, 2022-2025 (triliun rupiah)



HIBAH

Penerimaan hibah mencapai Rp0,06 T, dipengaruhi terutama oleh penerimaan hibah luar negeri. Hibah tersebut berasal dari hibah yang berasal dari luar negeri dengan skema terencana multilateral dan hibah dalam negeri terutama dari pemerintah daerah.

BELANJA NEGARA

Realisasi Belanja Negara sampai dengan Februari Tahun 2025 mencapai Rp348,0 T (9,6% dari APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 T), terdiri atas realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 T (7,8% dari APBN 2025) dan Transfer ke Daerah sebesar Rp136,6 T (14,9% dari APBN 2025).

PADA BULAN FEBRUARI 2025, BPP DIMANFAATKAN UTAMANYA UNTUK MENJAGA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SERTA PEMBAYARAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 T tersebut terdiri dari realisasi Belanja K/L dan Belanja Non-K/L. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp83,6 T (7,2% dari APBN 2025) dan dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai PKH dan Kartu Sembako, bantuan iuran PBI JKN, serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri. Selanjutnya, Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 T (8,3% dari APBN 2025) serta dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi. Adapun penjelasan kinerja Belanja K/L sampai dengan Februari 2025 berdasarkan jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut.

Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp36,3 T (11,9% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan sebesar Rp23,8 T dan komponen tunjangan kinerja, honorarium, lembur, dan lainnya sebesar Rp12,5 T. Realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran gaji dan tunjangan PPPK.

Realisasi Belanja Barang K/L mencapai Rp18,3 T (3,8% dari APBN 2025). Penurunan belanja barang antara lain disebabkan oleh penyaluran BOS dan persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 yang cukup besar. Secara rinci realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) pembayaran subsidi selisih biodiesel (BPDPKS), (2) pelayanan kesehatan UPT Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes; (3) dukungan keamanan & ketertiban masyarakat; (4) bantuan dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi; dan (5) pelayanan transportasi darat, laut, dan udara.

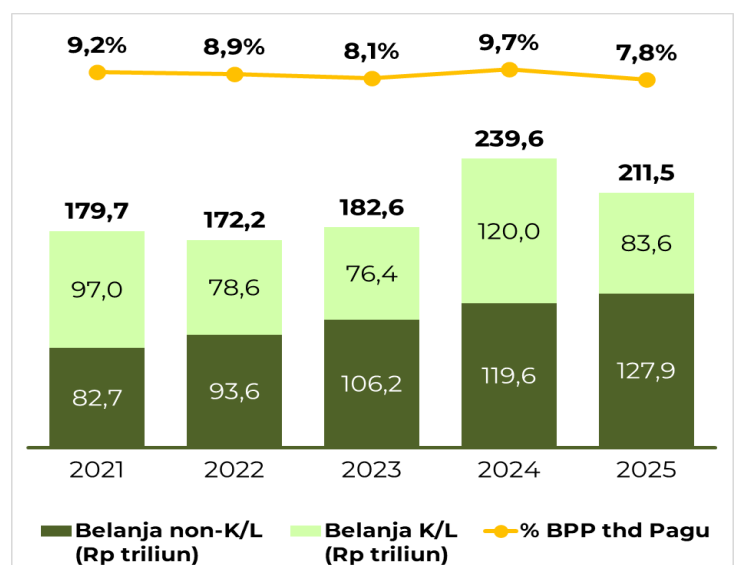
Realisasi Belanja Modal mencapai Rp3,1 T (1,3% dari pagu APBN 2025), yang dipengaruhi antara lain antara lain oleh pengadaan peralatan dan mesin. Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana bidang pendidikan oleh Kementerian Pertahanan; (2) pengadaan almatsus oleh Polri; (3) pengadaan sarpras pada Kejaksaan; serta (4) prasarana pendidikan dasar, menengah, dan tinggi oleh Kementerian Agama.

Realisasi Bantuan Sosial K/L mencapai Rp25,9 T (19,2% dari pagu APBN 2025), utamanya dipengaruhi oleh telah disalurkan bantuan PKH dan Kartu

Sembako triwulan I 2025. Sampai dengan akhir Januari 2025, realisasi belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta KPM, (2) penyaluran bantuan kartu sembako bagi 17,2 juta KPM, (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan PIP dan KIP Kuliah; (5) pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) serta bantuan permakanan bagi yatim piatu, lansia dan penyandang disabilitas.

Realisasi Belanja Non-K/L Tahun 2024 utamanya dipengaruhi oleh pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi. Realisasi pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp35,3 T (20,4% dari APBN 2025). Realisasi pembayaran bunga utang sebesar Rp79,3 T (14,3% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp10,7 T (3,5% dari APBN 2025). Realisasi Belanja Subsidi terdiri atas: (1) Subsidi Energi sebesar Rp10,6 T, dengan penyaluran BBM bersubsidi sebesar 1,5 juta KL, LPG Tabung 3 Kg sebesar 0,7 juta MT, dan listrik bersubsidi untuk 41,8 juta pelanggan; dan (2) Subsidi Non-Energi sebesar Rp53,6 M, dengan manfaat penyaluran untuk Subsidi Bunga KUR kepada 531 ribu debitur dan plafon penyaluran KUR sebesar Rp28,7 T, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebesar 1,3 juta ton. Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp334,4 M (0,1% dari APBN 2025), antara lain dimanfaatkan untuk bantuan kemasyarakatan presiden.

Realisasi BPP s.d. 28 Februari
2021-2025
(triliun rupiah)



BELANJA PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH

REALISASI TRANSFER KE DAERAH (TKD) S.D. 28 FEBRUARI 2025 UTAMANYA UNTUK Mendukung Pelaksanaan Layanan Publik di Daerah, Antara Lain di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat.

Realisasi penyaluran TKD s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp136,6 T (14,9% terhadap APBN 2025), lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp134,7 T. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah dan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dalam memenuhi persyaratan penyaluran TKD.

Penyaluran DBH s.d. 28 Februari 2025 telah terealisasi sebesar Rp13,8 T (7,2% terhadap APBN 2025). Realisasi DBH tersebut terdiri dari DBH Pajak Rp5,6 T dan DBH SDA Rp8,2 T, sedangkan DBH Perkebunan Sawit belum terdapat realisasi penyaluran. Penggunaan DBH pada tahun 2025 antara lain diarahkan untuk mendukung kebijakan DBH earmarked bagi sektor-sektor prioritas yang didesain lebih luas dan fleksibel sesuai peraturan perundang-undangan.

Realisasi penyaluran DAU s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp86,6 T (19,4% terhadap APBN 2025). Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari penyaluran DAU Block Grant yang utamanya digunakan untuk pembayaran gaji ASN Daerah. Sementara itu, penyaluran DAU Specific Grant berupa Dukungan DAU untuk bidang pendidikan, kesehatan, pendanaan kelurahan, dan penggajian formasi PPPK tahun 2025 belum terdapat realisasi penyaluran.

Realisasi penyaluran DAK s.d. 28 Februari 2025 sebesar Rp30,3 T (16,4% terhadap APBN 2025). Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari penyaluran DAK Nonfisik (a.l. Dana BOS sebesar Rp25,9 T, Dana BOP PAUD sebesar Rp2,0 T, Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp0,8 T, serta Dana BOK dan BOKB sebesar Rp1,3 T). Sementara itu, DAK Fisik dan Hibah kepada Daerah belum terdapat realisasi.

Dana Otsus Aceh dan Provinsi-provinsi di wilayah Papua tahun 2025 diarahkan untuk penurunan kemiskinan, perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, serta mendukung capaian rencana induk

percepatan pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif. Selanjutnya, sama dengan periode tahun sebelumnya, s.d. 28 Februari 2025 belum terdapat realisasi penyaluran Otsus Aceh dan Otsus Provinsi-provinsi di wilayah Papua.

Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta pada tahun 2025 diarahkan untuk: (1) penurunan tingkat kemiskinan; (2) pemberdayaan masyarakat dan UMKM; dan (3) peningkatan penyediaan layanan dasar publik daerah. Selanjutnya, sama dengan periode tahun sebelumnya, s.d. 28 Februari 2025 belum terdapat realisasi penyaluran Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta.

Dana Desa pada tahun 2025 difokuskan antara lain untuk: (1) penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi sebesar 15% dari pagu yang diterima setiap desa; (2) penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting; (3) dukungan program ketahanan pangan; dan (4) operasional pemerintah desa paling tinggi sebesar 3% dari pagu yang diterima setiap desa. Realisasi penyaluran Dana Desa s.d. 28 Februari 2025 mencapai Rp5,9 T (8,3% terhadap APBN 2025). Realisasi Dana Desa tersebut termasuk penyaluran BLT Desa sebesar Rp91,4 M yang ditujukan bagi sekitar 304 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa.

Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan Dana Insentif Fiskal kepada daerah dengan tujuan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola APBD dan meningkatkan kemandirian daerah. Realisasi Dana Insentif Fiskal s.d. 28 Februari 2025 sebesar Rp65,7 M (1,1% terhadap APBN 2025).

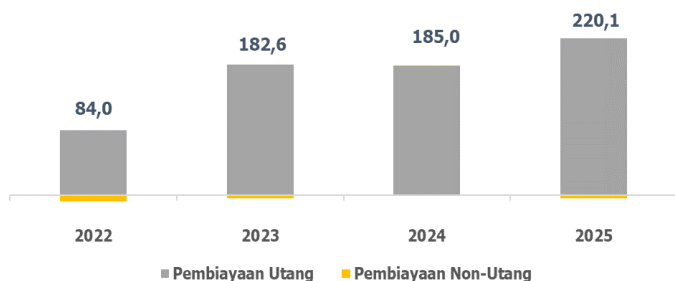
Realisasi Penyaluran TKD s.d. 28 Februari, 2022-2025 (triliun rupiah)



PEMBIAYAAN

Pembiayaan anggaran sampai dengan Bulan Februari 2025 terealisasi sebesar Rp220,1 T atau 35,7% dari APBN 2025. Realisasi ini disumbang dari realisasi pembiayaan utang dan realisasi pembiayaan non-utang.

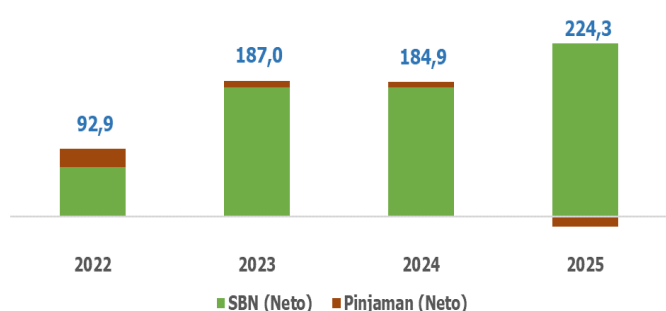
Realisasi Pembiayaan Anggaran s.d 28 Februari, 2022-2025 (triliun Rupiah)



Pada pos pembiayaan utang, sampai dengan Bulan Februari 2025 secara neto terealisasi sebesar Rp224,3 T atau 28,9% dari APBN 2025. Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari realisasi penerbitan SBN (neto) sebesar Rp238,8 T dan realisasi pinjaman (neto) sebesar negatif Rp14,4 T.

Selanjutnya, terkait dengan realisasi pinjaman (neto) dimaksud, terdiri dari realisasi Pinjaman Dalam Negeri (PDN) (neto) sebesar negatif Rp1,4 T dan realisasi Pinjaman Luar Negeri (PLN) (neto) sebesar negatif Rp13,0 T.

Realisasi Pembiayaan Utang s.d 28 Februari, 2022-2024 (triliun Rupiah)



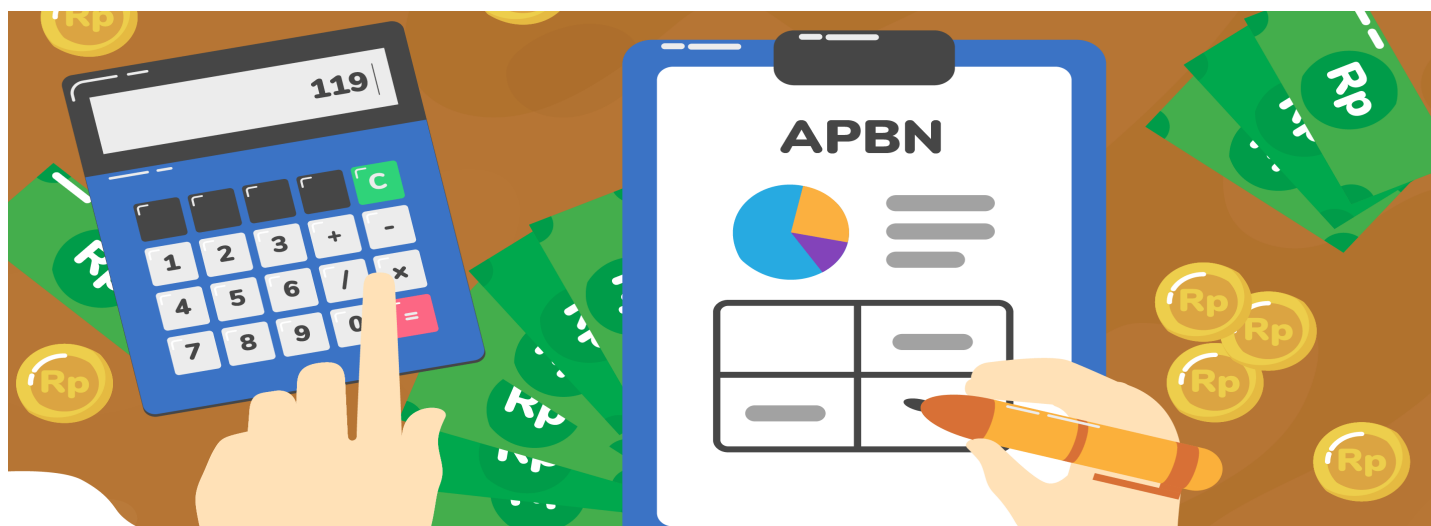
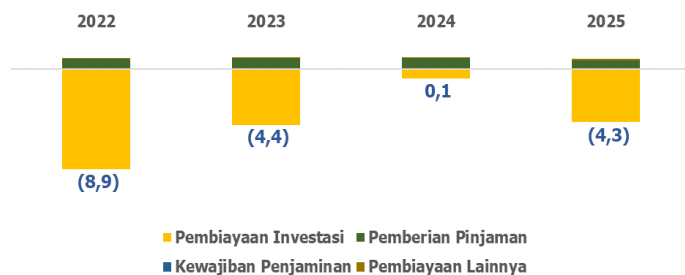
Sementara itu, dari pos pembiayaan non-utang, realisasi sampai dengan Bulan Februari 2025 sebesar negatif Rp4,3 T atau 2,7% dari APBN 2025, terdiri dari realisasi pembiayaan investasi sebesar negatif Rp5,3 T, realisasi pemberian pinjaman sebesar Rp0,9 T, dan realisasi pembiayaan lainnya sebesar Rp0,1 T.

Realisasi pembiayaan investasi sebesar negatif Rp5,3 T tersebut berasal dari penerimaan kembali investasi berupa penerimaan pengembalian pokok pinjaman PEN Daerah sebesar Rp0,7 T dan investasi pemerintah oleh BUN (non-permanen) berupa Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar negatif Rp6,0 T.

Sampai dengan Bulan Februari 2025, pemberian pinjaman telah terealisasi (neto) sebesar Rp0,9 T. Realisasi tersebut berasal dari realisasi Pinjaman kepada BUMN/Pemda (neto) sebesar Rp0,8 T dan penerimaan cicilan pengembalian dana antisipasi untuk pembayaran kepada masyarakat terdampak Lumpur Sidoarjo sebesar Rp0,1 T.

Selanjutnya, pos pembiayaan lainnya telah terealisasi sebesar Rp0,1 T yang berasal dari Hasil Pengelolaan Aset (HPA). HPA merupakan sumber penerimaan pembiayaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Penerimaan Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Realisasi Pembiayaan Non-Utang s.d 28 Februari, 2022-2024 (triliun Rupiah)



EVENT APBN**DISKUSI FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSET PRESENTATION IN FINANCIAL NOTES**

Penyelenggara	:	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Australian Government Department Of Finance
Waktu dan Tempat	:	6 Februari 2025, media online, Zoom
Narasumber	:	Michael Navaratnam (Director Budget Accounting and Systems in the Budget Management Branch (Budget Policy and Data Division) Louise Sartore, Australian Government Department Of Finance
Peserta	:	Para Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran

Rekomendasi peningkatan transparansi APBN untuk Indonesia diantaranya adalah pentediaan informasi aset dalam dokumen RAPBN serta meningkatkan akuntabilitas anggaran melalui standar akuntansi yang lebih baik. Studi perbandingan dengan Australia menunjukkan bahwa penerapan AASB 1049 memastikan pelaporan berbasis akrual yang mencakup seluruh sektor pemerintahan. Diskusi lebih lanjut diperlukan terkait mekanisme pemetaan anggaran ke dalam aset keuangan dan non-keuangan serta pendekatan terbaik dalam budgeting, apakah berbasis akrual atau kas. Michael Navaratnam menjelaskan bagaimana alur dan sistematika penyusunan anggaran yang juga mengedepankan basis proyeksi financial dan non financial asset. Sementara itu Louise Sartore melengkapi dengan pendekatan proses bisnis dan regulasi di Australia yang memayungi kegiatan tersebut.

**REDAKSI**

Direktorat Penyusunan APBN
Gedung Sutikno Slamet
Jl. DR Wahidin No. 1
Jakarta Pusat
Telp: (021) 3849315
Email: penyusunan.apbn@gmail.com

Ditandatangani secara elektronik

PRUDENT

Profesional, Responsif, Unggul, Dedikatif, Efisien, No Korupsi, Transparan